PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Supriyadi No. 07 Nganjuk Kode Pos 64412 Telp/Fax. (0358) 3550772
Email : dinsospppa@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 62 /K/411.403/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk, diperlukan alat alat berupa Indikator Kinerja Individu;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud bertujuan untuk :

a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan, sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dimanfaatkan untuk :

a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
c. Penetapan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal ,09 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK



NAFIAN TOHAWI,SH,MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Dinas Sosial PPPA
2. Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	1. Persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani	Jumlah PMKS yang tertangani x 100% Jumlah PMKS yang ada	Bidang PJRSK
	2. Persentase PMKS/PPKS menurun	Jumlah PMKS yang yang ada x 100% Jumlah Penduduk Kab. Nganjuk	Bidang PJRSK
Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif	Persentase jumlah PSKS yang aktif	Jumlah PSKS yang aktif x 100% Jumlah PSKS yang ada	Bidang PSK
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	1. Persentase ASN Perempuan yang menduduki jabatan struktural meningkat	Jml ASN Perempuan yang menduduki jabatan struktural / Jml jabatan struktural yang ada x 100%	Bidang PP
Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	2. Persentase kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	Jumlah kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang difaslitasi / jumlah kasus tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan x 100%	Bidang PPA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial PPPA
2. Tugas : Membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, laporan, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga
3. Fungsi : a. Pelaksanaan urusan keuangan
   b. Pelaksanaan urusan kepegawaian
   c. Penyusunan laporan
   d. Pelaksanaan urusan tata persuratan
   e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga
   f. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan
   g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

SASARAN/KINERJAUTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULAI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah/kota	Terwujudnya jumlah laporan perangkat daerah	Jumlah laporan PD yang tersedia	Dinas Sosial PPPA
	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan iktisiar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan x 100% Jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan pedoman	2 Laporan
	Terwujudnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan x 100% Jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan pedoman	4 Dokumen
Terpenuhinya laporan perencanaan daerah	Prosentase laporan Restra	Jumlah dokumen perencanaan x 100% Jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan pedoman	Restra
	Prosentase laporan Renja	Jumlah dokumen perencanaan x 100% Jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan pedoman	Renja
	Prosentase laporan RKPD	Jumlah dokumen perencanaan x 100% Jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan pedoman	RKPD
Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Terwujudnya gaji dan tunjangan ASN	Memproses pengajuan gaji dan tunjangan, tpp ASN setiap bulanya	Perhitungan sesuai aturan
	Terwujudnya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya anggaran perjalanan dinas	DPA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

SASARAN/KINERJAUTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULAI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	SPJ GU/TU
	Terwujudnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan SPJ GU/TU tepat waktu x 100% Jumlah laporan SPJ GU/TU	SPJ GU/TU
Terpenuhinya kepegaweaian perangkat daerah	Terwujudnya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tersedianya anggaran	DPA/ 40 Orang
	Terwujudnya sosialisasi peraturan perundang-perundangan	Jumlah peraturan yang disosialisasikan selama satu tahun	DPA
	Terwujudnya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah data yang tersedia/ jumlah data yang ada x 100%	DPA
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Terwujudnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya anggaran pembelian instalasi listrik	DPA/ 12 Paket
	Terwujudnya bahan logistik kantor	Tersedianya anggaran pembelian atk	DPA/ 5 Paket
	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya anggaran cetak dan penggandaan	DPA/ 1 Dokumen
	Terwujudnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya anggaran pembelian koran Jawa Pos	DPA
	Terwujudnya fasilitas kunjungan tamu	Tersedianya anggaran mamin tamu	DPA/ 12 Laporan
	Terwujudnya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya anggaran mamin rapat	DPA/ 12 Laporan
Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terwujudnya peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya anggaran pengadaan komputer dan printer	DPA/ 6 Unit
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase laporan penyedian surat menyurat	Jumlah surat yang terdistribusi x 100% Jumlah keseluruhan surat masuk dan keluar	Agenda Surat Masuk Agenda Surat Keluar
	Terwujudnya laporan penyedian jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya anggaran pembayaran listrik, telepon dan air	DPA/ 3 Laporan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

SASARAN/KINERJAUTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULAI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	Terwujudnya laporan penyediaan jasa layanan umum kantor	Tersedianya anggaran jas kebersihan	DPA/ 12 Laporan
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terwujudnya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya anggaran pemeliharaan kendaraan	DPA/27 Unit
	Terwujudnya pemeliharaan mebel	Tersedianya anggaran pemeliharaan mebelair	DPA/ 5 Unit
	Terwujudnya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya anggaran pemeliharaan komputer dan ac	DPA/51 Unit
	Terwujudnya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya anggaran pemeliharaan gedung kantor	DPA/5 Unit

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dinas Sosial PPPA

2.Tugas : a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan
b. Melaksanaan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan
c. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian
d. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terpenuhinya kepagawaian perangkat daerah	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tersedianya anggaran capacity building	DPA 40 Orang
	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang- perundangan	Jumlah peraturan yang disosialisasikan selama satu tahun	
	Prosentase terwujudnya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah data yang tersedia/ jumlah data yang ada x 100%	
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya anggaran pembelian instalasi listrik	DPA/ 12 Paket
	Prosentase tertib administrasi kearsipan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak	Jumlah arsip yang terdata/ jumlah arsip yang ada x 100%	
	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya anggaran pembelian koran Jawa Pos	DPA
Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terwujudnya peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya anggaran pengadaan komputer dan printer	DPA/ 6 Unit
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase surat yang terkirim/ terdistribusikan tepat waktu	Jumlah surat yang terdistribusi x 100% Jumlah keseluruhan surat masuk dan keluar	Agenda Surat Masuk Agenda Surat Keluar

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	Melaksanakan laporan penyediaan jasa layanan umum kantor	Tersedianya anggaran jas kebersihan	DPA/ 12 Laporan
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerajh	Melaksanakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya anggaran pemeliharaan kendaraan	DPA/27 Unit
	Melaksanakan pemeliharaan mebel	Tersedianya anggaran pemeliharaan mebelair	DPA/ 5 Unit
	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya anggaran pemeliharaan komputer dan ac	DPA/51 Unit
	Melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya anggaran pemeliharaan gedung kantor	DPA/5 Unit

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1.Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

2.Tugas : a. Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan Anggaran
b. Menyusun rencana kerja anggaran (RKA-OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD)
c. Melaksanakan tertib administrasi keuangan
d. Menyusun laporan keuangan
e. Melaksanakan tugas tambahan Perencana Ahli Muda
f. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULAI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah/kota	Terpenuhinya jumlah laporan perangka daerah	Jumlah dokumen perencanaan x 100% Jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan pedoman	Dinas Sosial PPPA
	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan iktisiar realisasi kinerja dan iktisiar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan x 100% Jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan pedoman	SPJ GU/TU
	Terpenuhinya laporan Renja	Jumlah dokumen perencanaan x 100% Jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan pedoman	Renja
	Terpenuhinya laporan RKPD	Jumlah dokumen perencanaan x 100% Jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan pedoman	RKPD
Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN	Memproses pengajuan gaji dan tunjangan, tpp ASN setiap bulanya	Perhitungan gaji dan TPP sesuai aturan
	Terpenuhinya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya anggaran perjalanan dinas	DPA
	Prosentase laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan SPJ GU/TU tepat waktu x 100% Jumlah laporan SPJ GU/TU	SPJ GU/TU
	Prosentase laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	Jumlah laporan SPJ GU/TU tepat waktu x 100% Jumlah laporan SPJ GU/TU	SPJ GU/TU

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULAI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	Prosentase laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	Jumlah laporan SPJ GU/TU tepat waktu x 100% Jumlah laporan SPJ GU/TU	SPJ GU/TU
Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya bahan logistik kantor	Tersedianya anggaran	DPA/ 5 Paket
	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya anggaran	DPA/ 2 Paket
	Prosentase fasilitasi kunjungan tamu		DPA
	Terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya anggaran	DPA/ 12 Laporan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
Tahun 2023

1. Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan
2. Tugas : Merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan kepahlawanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi : a. pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan
   b. perumusan pedoman penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan
   c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan
   d. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan
   e. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	DPA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk
Terpeliharanya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yodha Pralaya Kab. Nganjuk	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	DPA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk
Terwujudnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	- Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Pekerja Sosial masyarakat (PSM) - Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) - Terlaksananya peningkatan Kelembagaan Karang Taruna	Jumlah PSM yang mendapatkan pembinaan Jumlah TKSK yang mendapatkan pembinaan Jumlah Karang Taruna / Lembaga yang mendapatkan pembinaan	DPA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
Tahun 2023

1. Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda
2. Tugas :
   a) merancang kebijakan teknis Kepahlawanan, keperintisan, kejuangan
   b) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Kepahlawanan, keperintisan, kejuangan
   c) melaksanakan tugas di bidang Kepahlawanan, keperintisan, kejuangan
   d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terpeliharanya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Pralaya Kab. Nganjuk	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	DPA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	DPA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
Tahun 2023

1. Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda
2. Tugas : a) menyusun kebijakan teknis pemberdayaan perorangan, keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial
   b) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemberdayaan perorangan dan keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial
   c) melaksanakan tugas pemberdayaan perorangan dan keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial
   d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	- Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Pekerja Sosial masyarakat (PSM) - Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) - Terlaksananya peningkatan Kelembagaan Karang Taruna	Jumlah PSM yang mendapatkan pembinaan Jumlah TKSK yang mendapatkan pembinaan Jumlah Karang Taruna / Lembaga yang mendapatkan pembinaan	DPA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
Tahun 2023

1. Jabatan : Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial
2. Tugas : a) membantu menyusun kebijakan teknis pemberdayaan perorangan, keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial
   b) membantu melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pemberdayaan perorangan dan keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial
   c) membantu melaksanakan tugas pemberdayaan perorangan dan keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial
   d) membantu melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	- Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Pekerja Sosial masyarakat (PSM) - Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) - Terlaksananya peningkatan Kelembagaan Karang Taruna	Jumlah PSM yang mendapatkan pembinaan Jumlah TKSK yang mendapatkan pembinaan Jumlah Karang Taruna/Lembaga yang mendapatkan pembinaan	DPA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Terlaksananya kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	DPA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan
2. Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis mengelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan rehabilitasi sosial serta jaminan sosial
3. Fungsi : a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas , lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga
   b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam
   c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial keluarga
   d. Pengembangan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	a.	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah klien yang terlayani dan tertangani	Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk
	b.	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah disabilitas miskin yang mendapat bantuan sosial	
	c.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lanjut usia miskin yang mendapat bantuan sosial	
	d.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah klien yang terlayani dan tertangani	
	e.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS yang mendapat bantuan sembako	
	f.	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah klien yang terlayani dan tertangani	
	g.	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang kehabisan bekal yang tertangani	
	h.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapat bantuan sosial	
Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial	a.	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah warga miskin yang masuk DTKS	
	b.	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah siswa miskin yang mendapat bantuan sosial	
Persentase Pelayanan PMKS	a.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang tertangani	

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda
2. Tugas : a. Melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksaaan Rehabilitasi Sosial

   b. Melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksaaan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual diluar Panti dan/atau lembaga

   c. Mengerjakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksaaan Rehabilitasi Sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, diluar panti dan/atau lembaga

   d. Mengerjakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksaaan kebijakan di bidang rehabiolitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga

   e. Melaksanakan pelayanan sosial dengan HIV/AIDS (ODHA) dan penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah propinsi

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	a.	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah klien yang terlayani dan tertangani	Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk
	b.	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah disabilitas miskin yang mendapat bantuan sosial	
	c.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PPKS yang mendapat bantuan sembako	
	d.	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah klien yang terlayani dan tertangani	
	e.	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang kehabisan bekal yang tertangani	
	f.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapat bantuan sosial	

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda
2. Tugas : a. Menyusun dan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten
   b. Memproses kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan
   c. Memproses kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan penguatan kapasitas dan pelaporan pendampingan
   d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial	a.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lanjut usia miskin yang mendapat bantuan sosial	Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk
	b.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah klien yang terlayani dan tertangani	
Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial	a.	Jumlah lokasi Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah warga miskin yang masuk DTKS	
	b.	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah siswa miskin yang mendapat bantuan sosial	
Persentase Pelayanan PMKS	a.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang tertangani	

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
TAHUN 2023

1. Nama : Dra. MURYA TRIANA, M.Si
2. Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
3. Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan yang meliputi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak.
4. Fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis program Pengarusutamaan Gender danPemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
   b. Perumusan pedoman teknis program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
   c. Pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
   d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak;
   e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak ; dan
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender	1. Terlaksananya Kegiatan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK
	2. Terlaksananya kegiatan Program Peningkatan kualitas keluarga	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga	
	3. Terlaksananya kegiatan program Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Gender dan Anak	

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
TAHUN 2023

1. Nama : NANIK YULIANI, S.Sos
2. Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
3. Tugas : Melaksanakan Kegiatan yang ada sesuai dengan tupoksi
4. Fungsi :
   a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
   b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
   c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan;
   d. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
   e. melaksanakan edukasi dan sosialisasi kebijakan pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran responsif gender;
   f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran responsif gender;
   g. melakukan advokasi dan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
   h. melakukan penguatan, pengembangan, advokasi kebijakan dan pendampingan serta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
   i. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan dan Kesetaraan Gender;
   j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan; dan
   k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terwujudnya PPRG di Kabupaten Nganjuk	Terlaksananya Pembuatan Buku PUG dan PPRG Kabupaten Nganjuk	Jumlah Buku PUG dan PPRG yang dicetak	DINAS SOSIAL, PPPA KABUPATEN NGANJUK
Terwujudnya PPRG di Kabupaten Nganjuk	Terlaksananya Koordinasi bagi Tim Focal Point OPD dan Desa serta Lembaga Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah peserta rapat koordinasi dan sinkronisasi PUG dan PPRG	
Terwujudnya PPRG di Kabupaten Nganjuk	Terlaksananya Pembinaan PUG bagi Lembaga	Jumlah peserta pembinaan PUG	

Dipindai dengan CamScanner

	Pemerintah		
Terwujudnya PPRG di Kabupaten Nganjuk	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang PUG dan Modul Pelatihan PUG dan PPRG bagi Focal Point OPD dan Desa Serta Pedamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tingkat Kecamatan dan Desa	Jumlah OPD yang ikut dalam sosialisasi Peraturan Bupati Tentang PUG dan Modul Pelatihan PUG dan PPRG bagi Focal Point OPD dan Desa Serta Pedamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tingkat Kecamatan dan Desa	
Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Dokumen Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan partisipasi perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah organisasi/lembaga yang terlibat dalam advokasi kebijakan dan pendampingan partisipasi perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	
Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Workshop Bagi Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat, serta Perguruan Tinggi	Terbentuknya tenaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah tenaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	
Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Workshop bagi Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat, serta Perguruan Tinggi	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah peserta peningkatan kualitas SDM lembaga peyedia layanan pemberdayaan perempuan	

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
TAHUN 2023

1. Nama : EMY AMBARYUNIK, SE
2. Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
3. Tugas : Melaksanakan Kegiatan yang ada sesuai dengan tupoksi
4. Fungsi : a. melakukan peningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
   b. menyiapkan bahan penyusunan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
   c. melakukan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga;
   d. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga;
   e. melakukan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
   f. mengerjakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
   g. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
   h. melakukan peningkatkan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
   i. menyiapkan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
   j. menyiapkan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
   k. melakukan pembinaan dan pemberdayaan perempuan kepala keluarga (peka);
   l. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait peningkatan kualitas keluarga dan kesetaraan gender; dan
   m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan, Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG, dan Pengembangan Kegiatan Masyarakat	Pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan, Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG, dan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Keluarga	Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Nganjuk
Terlaksananya Penguatan dan	Jumlah Sosialisasi Advokasi Kebijakan dan	Pelaksanaan Sosialisasi Advokasi	

Dipindai dengan CamScanner

Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan PKK, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan PKK	Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan PKK, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan PKK untuk Meningkatkan Kualitas Keluarga	
Terlaksananya Pelayanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Pelaksanaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak untuk Menyelesaikan Permasalan Keluarga	

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
TAHUN 2023

1. Nama : ENI YULIATI, SH
2. Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
3. Tugas : Melaksanakan Kegiatan yang ada sesuai dengan tupoksi
4. Fungsi : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sistem informasi dan data gender dan anak;
   b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis sistem informasi dan data gender dan anak;
   c. melaksanakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data gender dan anak dalam kelembagaan data;
   d. menyediakan data gender dan anak;
   e. menyajikan dan memanfaatkan data gender dan anak dalam kelembagaan data;
   f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan data gender dan anak; dan
   g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	OPD yang memanfaatkan data gender dan anak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan di OPD	Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Nganjuk

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak
3. Fungsi :
   1. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;
   2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;
   3. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan pengarusutamaan hak anak;
   4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan percepatan kabupaten layak anak (kla) dan pengarusutamaan hak anak (pha) sesuai amanat konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Jumlah Meningkatnya kualitas hidup perempuan	1. Terlaksananya Monev Layanan Perlindungan Perempuan 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan 3. Hibah WCC	DPA Dinsos PPPA Kab. Nganjuk
Meningkatnya pemenuhan HAK anak	Jumlah Meningkatnya pemenuhan HAK anak	1. Terlaksananya Pembinaan Forum Anak 2. Terlaksananya Pertemuan Rutin Forum Anak 3. Terlaksananya Konsolidasi Forum Anak Kecamatan 4. Terlaksananya Sosialisasi Organisasi Ramah Anak 5. Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kapasitas Forum Anak	DPA Dinsos PPPA Kab. Nganjuk

Dipindai dengan CamScanner

		6. Terlaksananya Kegiatan 2P 7. Terlaksananya Organisasi Ramah Anak	
Meningkatnya kualitas hidup anak	Jumlah Meningkatnya kualitas hidup anak	1. Terlaksananya Roadshow Perlindungan Anak 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak 3. Terlaksananya Pendampingan Kasus Anak 4. Terlaksananya Sosialisasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap anak 5. Terlaksananya Sosialisasi Layanan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	DPA Dinsos PPPA Kab. Nganjuk
Persentase kasus tindak kekerasan dan traficking terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya	Jumlah terlaksananya laporan tugas dari atasan	Terlaksananya Laporan / Kegiatan Tugas yang diberikan dari atasan	DPA Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
2. Tugas :
   1. Menyiapkan bahan teknis Program Perlindunan Perempuan dan Pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Perlindungan Perempuan.
   2. Menyusun rencana kerja dan anggaran program Pelindungan Perempuan;
   3. Merencanakan dan menyusun program kegiatan Perlindungan Perempuan
   4. Menyiapkan bahan penyusunan Standart Operasional Prosedur Kegiatan seksi Pemberdayaan Perempuan;
   5. Melakukan koordinasi dan singkronisasi pencegahan Kekerasan dan Perlindungan Perempuan
   6. Melakukakan koordinasi dan fasilitasi pengaduan masyarakat ,pendampingan ,penjangkauan dan konseling bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang memerlukan perlindungan khusus;
   7. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan perlindungan perempuan;
   8. Menyusun dan Mengolah Data dan pemetaan Data Kekerasan Terhadap Perempuan;
   9. Menyiapkan bahan fasilitasi serta penguatan lembaga / organisasi masyarakat serta jejaring penyedia layanan rujukan bagi perempuan yang memerlukan perlindungan khusus ;
   10. Menyiapkan bahan monitoring,evaluasi dan mengerjakan laporan sistem informasi online (SIMPONI)
   11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah Women Crisis Center (WCC) Kab. Nganjuk	DPA Dinsos PPPA Kab. Nganjuk

Dipindai dengan CamScanner

Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Monev Layanan Perlindungan Perempuan 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	DPA Dinsos PPPA Kab. Nganjuk
Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya laporan/kegiatan tugas dari atasan	Terlaksananya Lapoaran / Kegiatan Tugas dari Atasan	DPA Dinsos PPPA Kab. Nganjuk

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan — ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
2. Tugas
   1. Menyiapkan bahan teknis Program Perlindungan Khusus Anak Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perlindungan Khusus ANAK
   2. Merencanakan dan menyusun program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak
   3. Melakukan koordinasi dan singkronisasi pencegahan KTAmelalui jejaring penyedia layanan yg memerlukan perlindungan khusus
   4. Menyiapkan layanan pengaduan masyarakat ,pendampingan ,penjangkauan dan konseling bagi anak yg memerlukan perlindungan khusus
   5. Menyiapkan bahan monitoring,evaluasi dan mengerjakan laporan sistem informasi online (SIMPONI)
   6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya

SASARAN /KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Roadshow Perlindungan Anak	Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk
Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya koordinasidan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan khusus kewenangan kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terlaksananya Pendampingan Kasus Anak	Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk
Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Advokasi dn pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewengan kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap anak	Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk
Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Layanan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk

Dipindai dengan CamScanner

Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya Laporan/Kegiatan tugas yang di berikan atas	Terlaksananya Laporan / Kegiatan Tugas yang diberikan atasan	Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

2. Tugas :

1. Menyiapkan bahan teknis program penguatan kelembagaan pengarusutamaan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah melalui gugus tugas kabupaten/kota layak anak (KLA), non pemerintah dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak mengacu amanat konvensi hak anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Merencanakan dan menyusun program kegiatan penguatan kelembagaan PHA melalui partisipasi anak dalam pembangunan dalam wadah forum anak;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak bekerjasama dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa dalam mendukung percepatan pengembangan kabupaten layak anak sampai tingkat Kecamata, Desa/Kelurahan yang layak anak (Kelana dan Dekelana);
4. Melakuakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui layanan sekolah ramah anak, puskesmas dan / atau rumah sakit ramah anak dan pondok pesantren ramah anak serta ruang publik ramah anak ;
5. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas penguatan kelembagaan hak anak dan pengarusutamaan hak anak; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	• Terlaksananya Pembinaan Forum Anak • Terlaksananya Pertemuan Rutin Forum Anak • Terlaksananya Konsolidasi Forum Anak Kecamatan • Terlaksananya Sosialisasi Organisasi Ramah Anak • Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kapasitas Forum Anak • Terlaksananya Kegiatan 2P	DPA Dinsos PPPA Kab. Nganjuk

Dipindai dengan CamScanner

		• Terlaksananya Organisasi Ramah Anak	
	Jumlah terlaksananya kegiatan laporan tugas	Terlaksananya Kegiatan / Laporan Tugas yang diberikan atasan	DPA Dinas Sosial PPPA

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengadministrasi Umum
2. Tugas :
   1. Menyiapkan bahan teknis program penguatan kelembagaan pengarusutamaan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah melalui gugus tugas kabupaten/kota layak anak (KLA), non pemerintah dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak mengacu amanat konvensi hak anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   2. Merencanakan dan menyusun program kegiatan penguatan kelembagaan PHA melalui partisipasi anak dalam pembangunan dalam wadah forum anak;
   3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak bekerjasama dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa dalam mendukung percepatan pengembangan kabupaten layak anak sampai tingkat Kecamata, Desa/Kelurahan yang layak anak (Kelana dan Dekelana);
   4. Melakuakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui layanan sekolah ramah anak, puskesmas dan / atau rumah sakit ramah anak dan pondok pesantren ramah anak serta ruang publik ramah anak ;
   5. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas penguatan kelembagaan hak anak dan pengarusutamaan hak anak; dan
   6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	• Terlaksananya Pembinaan Forum Anak • Terlaksananya Pertemuan Rutin Forum Anak • Terlaksananya Konsolidasi Forum Anak Kecamatan • Terlaksananya Sosialisasi Organisasi Ramah Anak • Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kapasitas Forum Anak • Terlaksananya Kegiatan 2P	DPA Dinsos PPPA Kab. Nganjuk

Dipindai dengan CamScanner

		• Terlaksananya Organisasi Ramah Anak	
	Jumlah terlaksananya kegiatan laporan tugas	Terlaksananya Kegiatan / Laporan Tugas yang diberikan atasan	DPA Dinas Sosial PPPA

Dipindai dengan CamScanner